

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arifin Soenardjo, 2013, *Panduan dan Informasi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok*, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Jakarta.
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- E. Kartini, 2003, *Buku Ajar Hukum Maritim*, Akademi Maritim Djadajat, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5*, Djambatan, Jakarta.
- H.R. Soebekti S, 2002, *Hukum Maritim*, Yayasan Pendidikan Pelayaran Djadajat-1963, Jakarta.
- JH. Warokka, 1990, *Hukum Perkapalan*, Corps Perwira Pelayaran Besar Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria SW. Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Salim HS *et al*, 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Wiwoho Soedjono, 1987, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke Empat
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Staatsblad)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wet Borepubliek Van Koophandel)

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012 / PUU-I / 2003
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Bandar 1925 (Reden – Reglemant 1925)
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga
- Peraturan Menteri Perhubungan No PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama
- Peraturan Menteri Perhubungan No PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PK. 101 / 1 / 4 / DJPL-13 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal, 28 Maret 2013.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1115 / P / 3292 / M / 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, 5 September 1963.
- Surat Instruksi Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor UM.002 / 33 / 6 / SYB.TPK-2015 tentang Pendelegasian Penandatanganan Dokumen Kepelautan, Perkapalan, Pergerakan Kapal dan Surat Persetujuan Berlayar di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, 8 September 2015.
- Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor. UM.003 / 14 / 11 / Syb. Tpk-16 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kapal Berlabuh di Perairan Pelabuhan Tanjung Priok

Internet:

- Damang, "Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik", [http:// www. Negara.hukum.com / hukum / asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html](http://www.Negara.hukum.com/hukum/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html), diakses tanggal 2 Januari 2015.
- Gloria Samantha, "Terbaru: Panjang Garis Pantai Indonesia Capai 99.000 Kilometer", <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer>, diakses tanggal 18 Febuari 2015.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Geografi Indonesia”,
<http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>, diakses
tanggal 18 Febuari 2015.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa
Indonesia”, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>,
diakses tanggal 24 Agustus 2015.